

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	3
1.4 Landasan Hukum.....	4
1.5 Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Indikator Kinerja	7
2.3 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2 Ananlisis Capaian Kinerja	12
3.3 Realisasi Anggaran	18
3.4 Prestasi dan Penghargaan	23
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Rekomendasi	25
LAMPIRAN	
Perjajian Kinerja	
RKT/Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Target dan Sasaran	7
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja	8
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja	9
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
Tabel 3.2 : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	12
Tabel 3.3 : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	13
Tabel 3.4 : Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	14
Tabel 3.5 : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	15
Tabel 3.6 : Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	16
Tabel 3.7 : Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	17
Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	18

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2019-2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Slawi, Januari 2022

Kepala Dinas P3AP2 Dan KB

ELLIYA HIDAYAH, S.IP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690108 199003 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggunakan instrument pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebagai instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi, maka telah disusun perencanaan strategis, yang selanjutnya sebagai evaluasi hasil kinerja selama Tahun 2021 disusunlah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

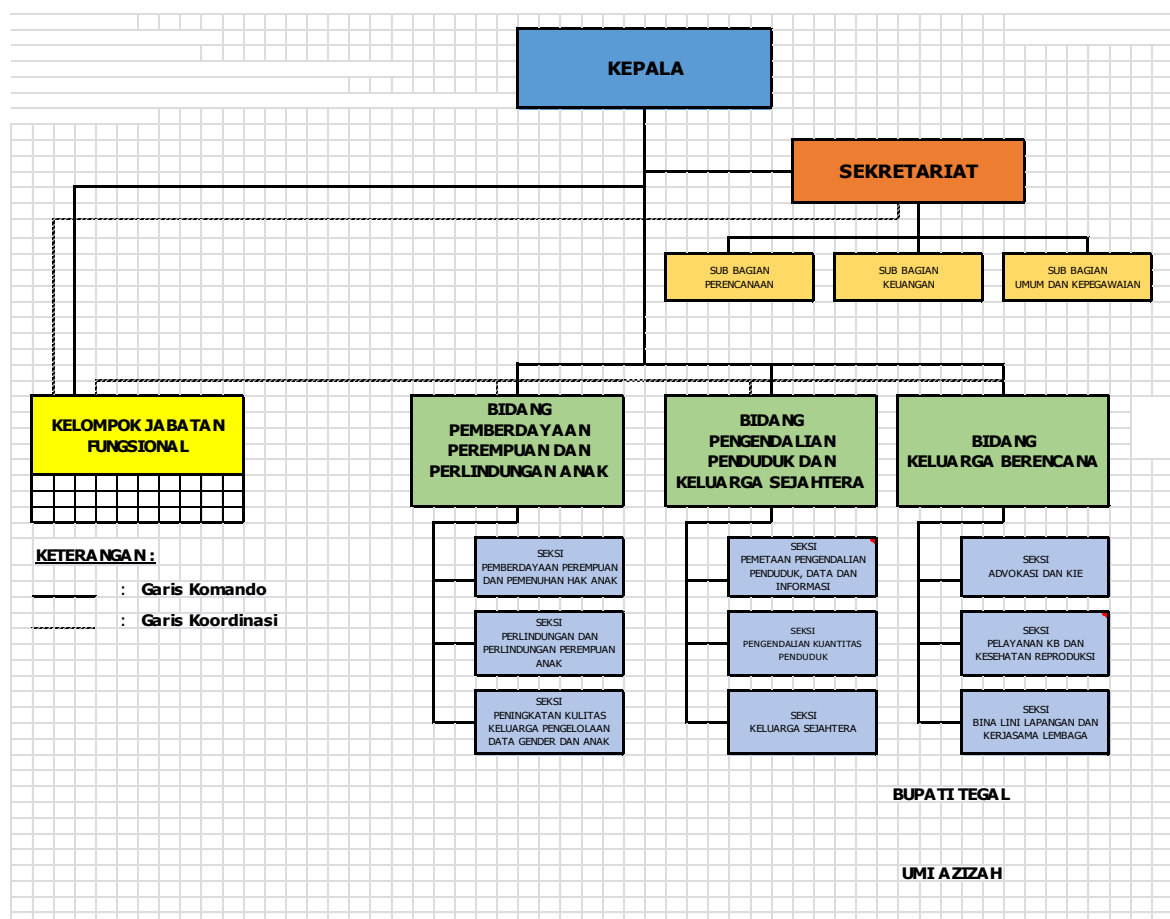
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Perencanaan;
 - Subbagian Keuangan ; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak ; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Data Gender dan Anak.
 2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pemetaan Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi ;
 - b. Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk ; dan
 - c. Seksi Keluarga Sejahtera.
 3. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Advokasi dan KIE;
 - b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - c. Seksi Bina Lini Lapangan dan Kerjasama Lembaga.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Di tingkat kecamatan dapat dibentuk satuan koordinasi non struktural dengan sebutan Koordinator P3AP2 & KB Wilayah Kecamatan yang keberadaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
**Struktur Organisasi Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal
 (Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021)**



1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bagian dari pembangunan prioritas di Pemerintah Kabupaten Tegal guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks

Pembangunan Gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Pembangunan program KB ini diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 (tiga) fokus prioritas, yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Isu – isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan metode Focused Group Discussion (FGD), dan ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya upaya dalam mempertahankan capaian kinerja pemberdayaan perempuan
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan Hak Anak
3. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

1.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2020 Sesuai Permenpan Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Ssitematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4 Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2019 melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan review dan revisi terhadap Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Penyusunan Review Renstra DP3AP2 dan KB kabupaten Tegal disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal. Dokumen perencanaan dengan orientasi jangka panjang dapat diidentifikasi sebagai upaya untuk mendesain kondisi yang dicita-citakan di masa mendatang. Kerangka berfikir yang mengacu pada cita-cita masa mendatang diharapkan memberi kejelasan dan mengarahkan pada rumusan masa depan daerah seperti yang sudah dituangkan dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Gender			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,85	86,94	87,03	87,12	87,21
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,30	69,70	70,16	70,80	71,40
		1.1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan Gender	72	73	75	76	77
2	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak								
		2.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak	55	60	65	70	75
3	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22
		3.1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total / TFR	2,44	2,40	2,37	2,33	2,30
		3.2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	48	52	55	58	60
		3.3	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	69,81	70,21	70,61	71,01	71,41

2.2 Perencanaan Kinerja

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra

Tabel 2.2
Rencana Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Gender			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks 86,94
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks 69,70
		1.1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan Gender	% 73
2	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak				
		2.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak	% 60
3	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks 0,25
		3.1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total / TFR	2,40
		3.2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	% 52
		3.3	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	% 70,21

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,70
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,94
		Persentase Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender	%	73
2	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)		2,4
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	%	60
4	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Indeks	0,25
5	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	%	52
6	Meningkatnya Kesertaan KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	70,21

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan kesekretariatan	95 %	3.414.337.300
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan Gender	73 %	173.932.100
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan	100 %	508.790.000
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	60 %	166.521.000
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani	15%	146.329.000

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
6	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,40	242.718.800
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	15,27 %	7.198.207.000
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Ketahanan Keluarga	52 %	1.028.230.900

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

Target dan realisasi kinerja tahun 2021;

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,70	72,12	103,47%	Sangat Tinggi	BPS
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,94	86,79	99,83%	Sangat Tinggi	BPS
		Persentase Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender	73	70	95,89%	Sangat Tinggi	
2	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,40	2,23	107,08%	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	60	61	101,67%	Sangat Tinggi	
4	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,25	0,13	148%	Sangat Tinggi	
5	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	52	54,91	105,60%	Sangat Tinggi	
6	Meningkatnya Kesertaan KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	70,21	67,77	96,52%	Sangat Tinggi	

Tabel 3.3
**Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir**

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			20 21		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,16	69,25	98,70 %	69,30	72,58	104,73 %	69,70	72,12	103,47 %
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	65,72	86,74	132,30 %	86,85	86,74	99,87 %	86,94	86,79	99,83 %
		Persentase Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender				72	94	130,56 %	73	70	95,89 %
2	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)				2,44	2,28	114,03 %	2,40	2,23	107,08 %
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak				55	50	90,91 %	60	61	101,67 %
4	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				0,26	0,12	153,85	0,25	0,13	148 %
5	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga				48	63,02	131,29 %	52	54,91	105,60 %
6	Meningkatnya Kesertaan KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	97,10	67,91	69,94 %	69,81	67,73	97,02 %	70,21	67,77	96,52 %

Tabel 3.4

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	% Capaian	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,12	103,47%	71,40	101,01 %
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,79	99,83%	87,21	99,51%
		Persentase Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender	70	95,89%	77	90,91%
2.	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,23	107,08%	2,30	106,28%
3.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	61	101,67%	75	81,33%
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,13	148%	0,22	238,46%
5.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	54,91	105,60%	60	91,52%
6.	Meningkatnya Kesertaan KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	67,77	96,52%	71,41	94,90%

Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,70	72,12	103,47%	Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya	-
2.	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,40	2,23	107,08%	Dengan membaiknya sosial ekonomi wanita, mereka akan lebih mudah menerima pengetahuan tentang cara membatasi kelahiran	-
3.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	60	61	101,67%	Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya.	-
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,25	0,13	148%	Mobilitas penduduk Kabupaten Tegal sangat tinggi, sehingga mempengaruhi jumlah real penduduk ketika dilakukan sensus penduduk.	-
5.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	52	54,91	105,60%	Didukung oleh kegiatan yang bersumber dari anggaran BOKB.	-

Tabel 3.6

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan gender	73	70	95,89 %	173.932.100	165.648.669	95,24 %	4,76 %
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan	100	100	100 %	508.790.000	331.844.536	65,22 %	34,78 %
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	60	61	101,67 %	166.521.000	158.826.500	95,38 %	4,62 %
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani	15	15,25	101,67 %	146.329.000	146.288.650	99,97 %	0,03 %
	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,40	2,23	107,08 %	242.718.800	228.645.650	94,20 %	5,80 %
	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	52	54,91	105,60 %	1.028.230.900	977.817.850	95,09 %	4,91 %
	Meningkatnya Kesertaan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	15,27	13,68	110,41 %	7.198.207.000	6.115.929.447	84,96 %	15,04 %
		Persentase Layanan Kesekretariat an	95	95	100 %	3.414.337.300	3.349.502.883	98,10 %	1,90 %

Tabel 3.7

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	103,47%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan gender	95,89%	Menunjang
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,83%	Program Perlindungan Perempuan			
		Persentase Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender	95,89%				
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	101,67%	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	101,67%	Menunjang
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani	101,67%	Menunjang
	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	107,08%	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	107,08%	Menunjang
	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	148%				
	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	105,60%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Ketahanan Keluarga	105,60%	Menunjang
	Meningkatnya Kesertaan KB	Persentase Pemakaian	96,52%	Program Pembinaan Keluarga	Persentase Pemakaian	96,52%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menun- jang/ Tidak menun- jang
		Kontrasepsi (CPR)		Berencana	Kontrasepsi (CPR)		
					Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	110,41%	Menunjang

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tegal Tahun 2021 disusun berdasarkan azas berbasis kinerja. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 12.879.067.000 ,- Sedangkan realisasi total pagu s.d. Desember 2021 adalah Rp. 11.474.504.185 ,- atau 88,37 %.

Adapun Realisasi anggaran dari program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal secara rinci adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.414.338.200	3.349.502.883	98,10
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	16.163.300	15.675.250	96,98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.163.300	15.675.250	96,98
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.649.551.900	2.643.849.778	99,78
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.601.266.900	2.596.579.778	99,82
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.285.000	47.270.000	97,90
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<i>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</i>	132.266.500	128.429.796	97,13
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.177.400	10.150.850	99,74
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.602.000	43.308.990	97,10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.126.100	9.126.100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.641.000	27.076.000	94,54
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.207.000	9.877.00	96,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6.473.000	6.020.000	93,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.000.000	22.870.956	99,44
	<i>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</i>	30.574.000	28.988.000	94,81
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.574.000	28.988.000	94,81
	<i>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	249.814.000	214.266.967	85,77
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.873.000	1.964.800	68,39
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.160.000	136.570.167	82,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.781.000	75.732.000	93,75
	<i>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</i>	336.008.500	318.293.092	94,73
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.154.000	150.676.092	92,92
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.528.000	34.440.000	99,75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.326.500	133.177.000	95,59
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	173.932.100	165.648.669	95,24
	<i>PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN</i>	173.932.100	165.648.669	95,24

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<i>KABUPATEN/KOTA</i>			
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	173.932.100	165.648.669	95,24
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	508.790.000	331.844.536	65,22
	<i>PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	52.190.000	52.190.000	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	52.190.000	52.190.000	100
	<i>PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</i>	456.600.000	279.654.536	61,25
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	132.650.000	118.307.800	89,19
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	323.950.000	161.346.736	49,81
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	166.521.000	158.826.500	95,38
	<i>PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</i>	166.521.000	158.826.500	95,38
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	166.521.000	158.826.500	95,38
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	146.329.000	146.288.650	99,97
	<i>PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	146.329.000	146.288.650	99,97
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	146.329.000	146.288.650	99,97
	PROGRAM PENGENDALIAN	242.718.800	228.645.650	94,20

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PENDUDUK			
	<i>PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK</i>	125.850.800	115.592.450	91,85
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	125.850.800	115.592.450	91,85
	<i>PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	116.868.000	113.053.200	96,74
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	116.868.000	113.053.200	96,74
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	7.198.207.000	6.115.929.447	84,96
	<i>PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL</i>	1.636.741.000	1.460.969.594	86,26
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	54.745.000	51.625.000	94,30
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	357.180.000	270.989.570	75,87
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.224.816.000	1.138.355.024	92,94
	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	1.377.600.000	1.377.600.000	100
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.377.600.000	1.377.600.000	100
	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.442.266.000	2.545.818.853	73,96
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	145.971.000	48.764.350	33,41
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.624.299.000	1.003.443.760	61,78

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.355.935.000	1.189.030.043	87,69
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	258.440.000	258.180.700	99,90
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	57.621.000	46.400.000	80,53
	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	741.600.000	731.541.000	98,64
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	741.600.000	731.541.000	98,64
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.028.230.900	977.817.850	95,09
	<i>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</i>	1.028.230.900	977.817.850	95,09
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	280.000.000	270.470.000	96,60
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	153.430.900	143.950.650	93,82
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	594.800.000	563.397.200	94,72

3.4. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal berhasil mendapatkan beberapa Prestasi dan Penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori MADYA



2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori MADYA



3. Nominasi sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja. Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Mendasari Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, yang didalamnya telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal secara berkelanjutan telah berupaya mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam dokumen Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, capaian kinerja tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari pelaksanaan rencana lima tahunan. Dinas P3AP2 dan KB dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik (sesuai dengan tabel 3.2).

4.2 Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DP3A dan P2KB di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang kompeten dan terlatih dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan
3. Meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah
4. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
5. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
6. Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha

7. Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan
8. Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup anak
9. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak
10. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak
11. Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan
12. Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK
13. Meningkatkan advokasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga
14. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program pembangunan keluarga
15. Meningkatkan kesertaan KB MKJP
16. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB
17. Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE KB
18. Meningkatkan layanan kesehatan reproduksi khususnya bagi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan
19. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui pengembangan kampung KB
20. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
21. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
22. Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 untuk OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Slawi, Januari 2022
Kepala Dinas P3AP2 Dan KB

ELLIYA HIDAYAH, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 199003 2 006